



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN
TAHUNAN
2018

PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL







Kehadiran Kementerian Sosial RI dalam struktur birokrasi pemerintahan telah banyak memberikan kontribusi yang positif bagi pencapaian negara untuk mewujudkan kesejahteraan warganya, terutama masyarakat miskin, tidak mampu dan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kondisi ini perlu terus menerus diupayakan sebagai tekad kemanusiaan dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara.

Memasuki tahun terakhir dan siklus ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 - 2025, tantangan kedepan bukan semakin mudah. Selain capaian yang telah kita raih, masih banyak target-target yang belum mampu kita penuhi. Ini menjadi pelecut kita di jajaran Kementerian Sosial untuk terus bekerja, meningkatkan kapasitas diri dan organisasi, membangun sinergi dan koordinasi, serta menciptakan iklim yang memungkinkan kita dapat mewujudkan hal tersebut.

Membaca Buku Laporan Tahunan Kementerian Sosial Tahun 2018 ini bukan hanya sekedar melihat dan mencermati keberhasilan dan kekurangan pekerjaan yang telah kita lakukan, tapi lebih dari itu bagaimana kita mampu berkomitmen dan berikhtihar untuk terus menjaga niat baik, ketulusan, dan sekaligus kecintaan kepada tanah air melalui pengabdian kepada negara di sektor penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Semoga niat baik kita ini mendapat ridha dan barokah dari Allah SWT, dan menjadikan *legacy* untuk dapat dilanjutkan oleh seluruh keluarga besar Kementerian Sosial.

Jakarta, Januari 2019

Menteri Sosial RI

A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Agus Gumiwang Kartasasmita'.

Agus Gumiwang Kartasasmita



PENGANTAR



Tahun 2018 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMN 2015-2019, yang berarti merupakan setahun menjelang berakhirnya RPJMN. Dalam kurun waktu tersebut, Kementerian Sosial telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target-target pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKP dan RPJMN.

Peningkatan kualitas hidup manusia, menjadi agenda prioritas dalam perlindungan dan kesejahteraan sosial tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam nawacita. Hal ini tentu saja menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab bagi Kementerian Sosial, selaku kementerian yang membidangi urusan sosial. Hal ini sejalan dengan amanat UUD 1945 dan Pancasila bahwa negara bertanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kementerian Sosial kembali mendapatkan opini WTP atas Laporan Keuangan dan juga berhasil melaksanakan perluasan PKH dan BPNT menjadi 10 Juta KPM. Kementerian Sosial berkomitmen untuk terus meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih berkualitas dan akuntabel. Kami berharap Kementerian Sosial dapat selalu hadir dan dampak kebijakannya terasa bagi seluruh masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sepanjang tahun 2018 tertuang dalam Laporan ini, yang menyajikan peristiwa penting, capaian-capaian program prioritas nasional serta *outlook* 2019. Kami berharap, laporan yang disajikan dapat memberikan informasi positif bagi semua pihak.

Jakarta, Januari 2019
Sekretaris Jenderal

Hartono Laras

DAFTAR ISI

Pengantar **Capaian Utama**

- Bab 1** Sekilas Kementerian Sosial
1. Tujuan, Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Strategi
 2. Struktur Organisasi
 3. Sumber Daya Manusia
 4. Anggaran
- Bab 2** Capaian Kinerja 2018
1. Peristiwa Penting
 2. RKP 2018
 3. Capaian Program Prioritas Nasional
 4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 5. Kerjasama Luar Negeri
 6. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
- Bab 3** Outlook 2019
1. RKP 2019
 2. Perluasan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
 3. Peningkatan Kualitas Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan
 4. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial
- Bab 4** Penutup



BAB 1

Sekilas Kementerian Sosial

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan



VISI

Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan nilai dan semangat gotong royong.



MISI

Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera



Tujuan

Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan



Sasaran Strategis

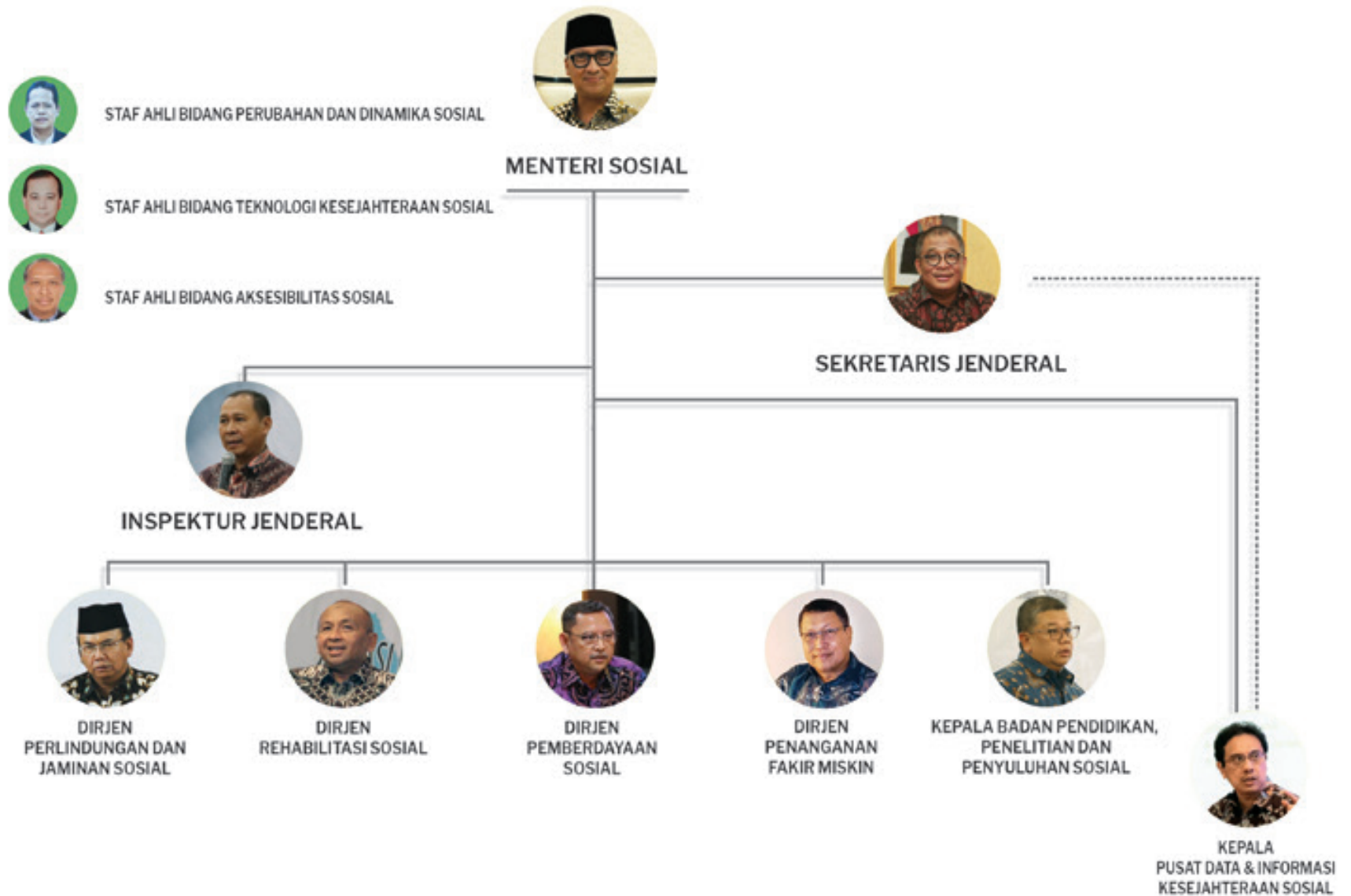
- a. Berkontribusi menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan
- b. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional



Arah Kebijakan

- a. penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif
- b. pengembangan penghidupan berkelanjutan
- c. perluasan dan peningkatan akses pelayanan dasar
- d. penguatan kelembagaan dan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial

Struktur Organisasi Permensos No. 20/2015



Sumber Daya Manusia Kemensos



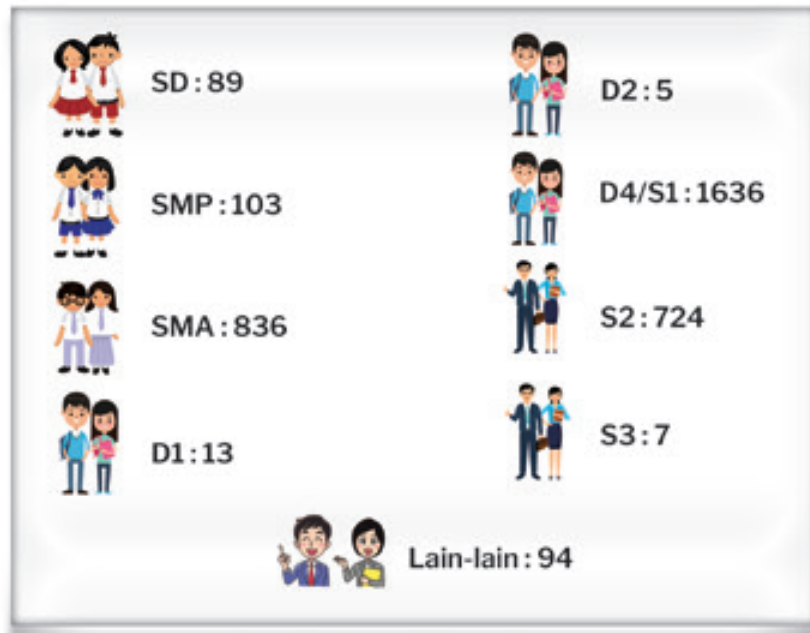
3.904 orang



1.819 orang



2.085 orang



Kantor Pusat : 1.625



Kantor Daerah : 2.279

■ Anggaran Tahun 2018

ANGGARAN KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2018		
Total Anggaran : Rp. 43.393.136.929.000,-		
No.	UNIT	ANGGARAN
1	Sekretariat Jenderal	338.089.886.000
2	Inspektorat Jenderal	45.999.752.000
3	Ditjen Pemberdayaan Sosial	498.505.882.000
4	Ditjen Rehabilitasi Sosial	1.025.616.559.000
5	Ditjen Perlindungan & Jaminan Sosial	19.668.377.420.000
6	Ditjen Penanganan Fakir Miskin	21.455.112.967.000
7	Badan Pendidikan, Penelitian dan Penulhan Sosial	261.343.463.000



BELANJA PEGAWAI
 Rp. 483.600.541.000,-



BELANJA BARANG
 Rp. 3.663.067.121.000,-



BELANJA MODAL
 Rp. 136.894.897.000,-



BELANJA BANSOS
 Rp. 39.109.574.370.000,-

**Penerimaan Hibah Langsung
 Dalam Negeri TA 2018**
Rp. 101.957.764.041,-





BAB 2

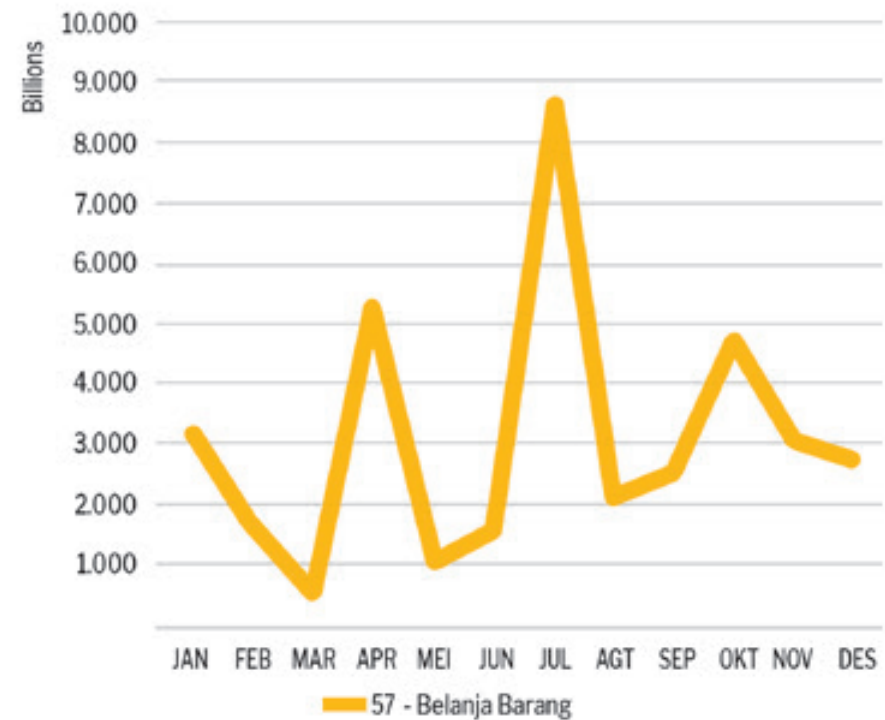
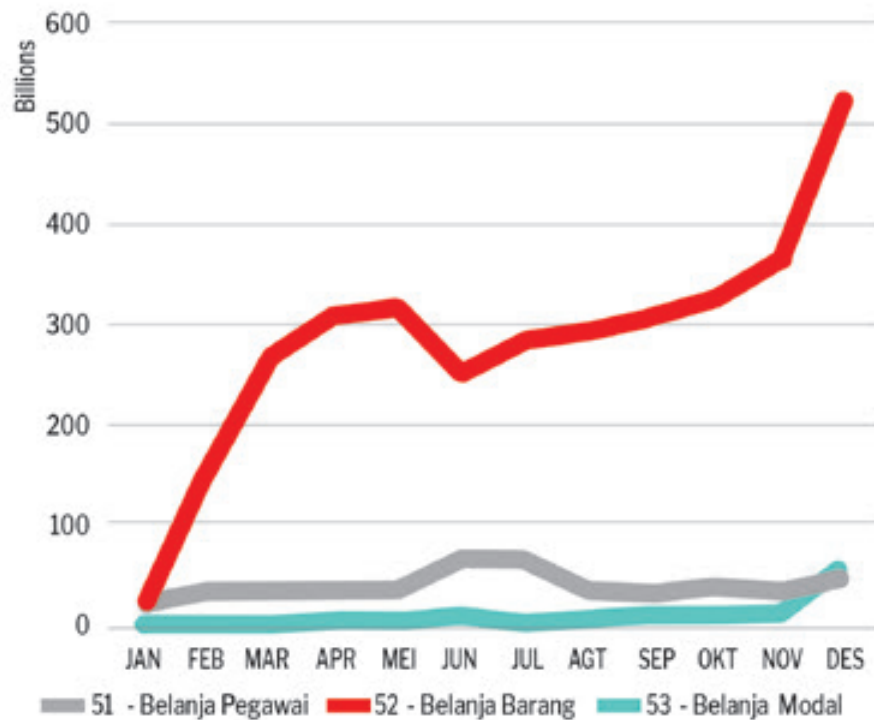
Capaian Kinerja



■ Realisasi Anggaran Kementerian Sosial Tahun 2018

No.	Program / Unit Kerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Sekretariat Jenderal	338.089.886.000	327.006.448.055	96.72
2	Inspektorat Jenderal	45.999.752.000	44.570.840.734	96.89
3	Ditjen Pemberdayaan Sosial	498.505.882.000	480.771.041.123	96.44
4	Ditjen Rehabilitasi Sosial	1.025.616.559.000	992.473.134.218	96.77
5	Ditjen Perlindungan & Jaminan Sosial	19.668.377.420.000	19.552.174.281.157	99.41
6	Ditjen Penanganan Fakir Miskin	21.455.112.967.000	19.483.719.617.272	90.81
7	Badan Pendidikan, Penelitian dan Penuluhan Sosial	361.434.463.000	353.397.861.385	97.78
TOTAL		43.393.136.929.000	41.234.113.223.944	95.02

■ Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sosial Tahun 2018
 Realisasi Anggaran per Jenis Belanja per Bulan



Masih terjadi penumpukan belanja barang di akhir tahun. Sedangkan penyebaran realisasi untuk belanja pegawai dan belanja modal sudah baik.

Realisasi belanja Bansos belum sepenuhnya mengikuti ketentuan tahapan penyaluran Bansos ke KPM

Sumber : Direktorat Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan

■ Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sosial Tahun 2018
 Revisi DIPA

ESELON 1	JUMLAH REVISI
Sekretariat Jenderal	74
Inspektorat Jenderal	2
Ditjen Pemberdayaan Sosial	103
Ditjen Rehabilitasi Sosial	373
Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	100
Ditjen Penanganan Fakir Miskin	69
Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial	56
TOTAL	777

Jenis revisi yang paling sering dilakukan adalah revisi kesalahan administrasi seperti perubahan pejabat perbendaharaan, ralat rencana penarikan dan (Hal III DIPA) dan revisi POK

Sumber : Direktorat Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan

JENIS REVISI	JUMLAH REVISI
Pergeseran dalam 1 keluaran, 1 kegiatan, 1 Satker	82
Pergeseran antar keluaran, 1 kegiatan, 1 Satker	28
Pergeseran antar kegiatan dalam 1 Satker	2
Pergeseran anggaran untuk penggunaan sisa anggaran kontraktual/ swakelola menambah output	1
TOTAL	113

Jenis Revisi yang digunakan dalam perhitungan IKPA hanyalah perubahan/pergeseran hal pagu tetap





■ Program Pemberdayaan Sosial

	TARGET	REALISASI	%	CATATAN
 Bantuan stimulan pemukiman sosial bagi warga KAT	1.9000KK	1.753 KK	92,26	Penyedia jasa (rekanan) tidak mampu melaksanakan pembangunan rumah sebagaimana tertuang dalam kontrak, yaitu di Prov. NTT (35 KK) dan Jambi (112 KK).
 Pengembangan Sistem dan Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	130 Kab/Kota	130 Kab/Kota	100	
 Sistem Pelayanan Sosial Terpadu melalui Puskessos	260 Desa/Kel	260 Desa/Kel	100	



■ Program Rehabilitasi Sosial

	TARGET	REALISASI	%	CATATAN
 Kesejahteraan sosial anak integratif	101.362 anak	101.372 anak	100.01	Kenaikan capaian target terkait dengan respon atas kasus yang masuk.
 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas	38.383 orang	28.610 orang	100.80	Kenaikan capaian target terkait dengan respon atas kasus yang masuk.
 Literasi Khusus bagi Penyandang Disabilitas	35 literasi	35 literasi	100	
 Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia	25.430 orang	25.430 orang	100	
 Pemberian Layanan Home Care bagi Lanjut Usia	14.910 orang	14.910 orang	100	
 Rehabilitasi Sosial Orang dengan HIV/AIDS	821 orang	831 orang	101,22	Kenaikan capaian target terkait dengan respon atas kasus yang masuk.
 Rehabilitasi Sosial Korban Tindak Kekerasan	750 orang	750 orang	100	



■ Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

	TARGET	REALISASI	%	CATATAN
 Penyaluran Bantuan PKH	10.000.000 KPM	10.000.000 KPM	100	
 Korban Bencana Alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	92.000 orang	607.643 orang	660,48	
 Kesiapsiagaan dan penguatan masyarakat di lokasi bencana	6.500 orang	6.500 orang	100	
 Korban Bencana Sosial yang mendapatkan kebutuhan dasar	137.000 orang	138.107 orang	100,8	Meningkatnya capaian target didukung penggunaan dana hibah dalam negeri



■ Program Penanganan Fakir Msikin


	TARGET	REALISASI	%	CATATAN
 Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	10.259.899 KPM	10.093.866 KPM	98,38	Terdapat pengembalian Bansos akibat KKS yang gagal burekol.
 Bansos Rastra	5.340.101 KPM	5.340.101 KPM	100	
 Kelompok Usaha Bersama (KUBe)	119.021 KPM	118.809 KPM	99,82	
 Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS RTL)	10.775 KPM	10.736 KPM	99,64	Terdapat pengurangan KPM pasca gempa di Lombok Utara karena adanya edaran Gubernur bahwa KPM yang menerima bantuan pasca gempa tidak menerima bantuan RS RTL



■ Program Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial

	TARGET	REALISASI	%	CATATAN
 Program Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2) bagi Pendamping Sosial PKH	3.392 KPM	3.392 orang	100	
 SDM Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan sertifikasi	3.000 orang	2.538 orang	84,6	Peserta sertifikasi jumlahnya 3.113 Orang atau 103,76% dari target, namun yang lulus hanya 2.538 Orang
 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang telah mendapatkan akreditasi	2.000 LKS	1.170 LKS	58,50	Pelaksanaan akreditasi terkendala dengan kurangnya anggaran untuk melakukan visitasi ke LKS di wilayah timur, yang letaknya berjauhan antar lokasi sehingga membutuhkan anggaran yang banyak.

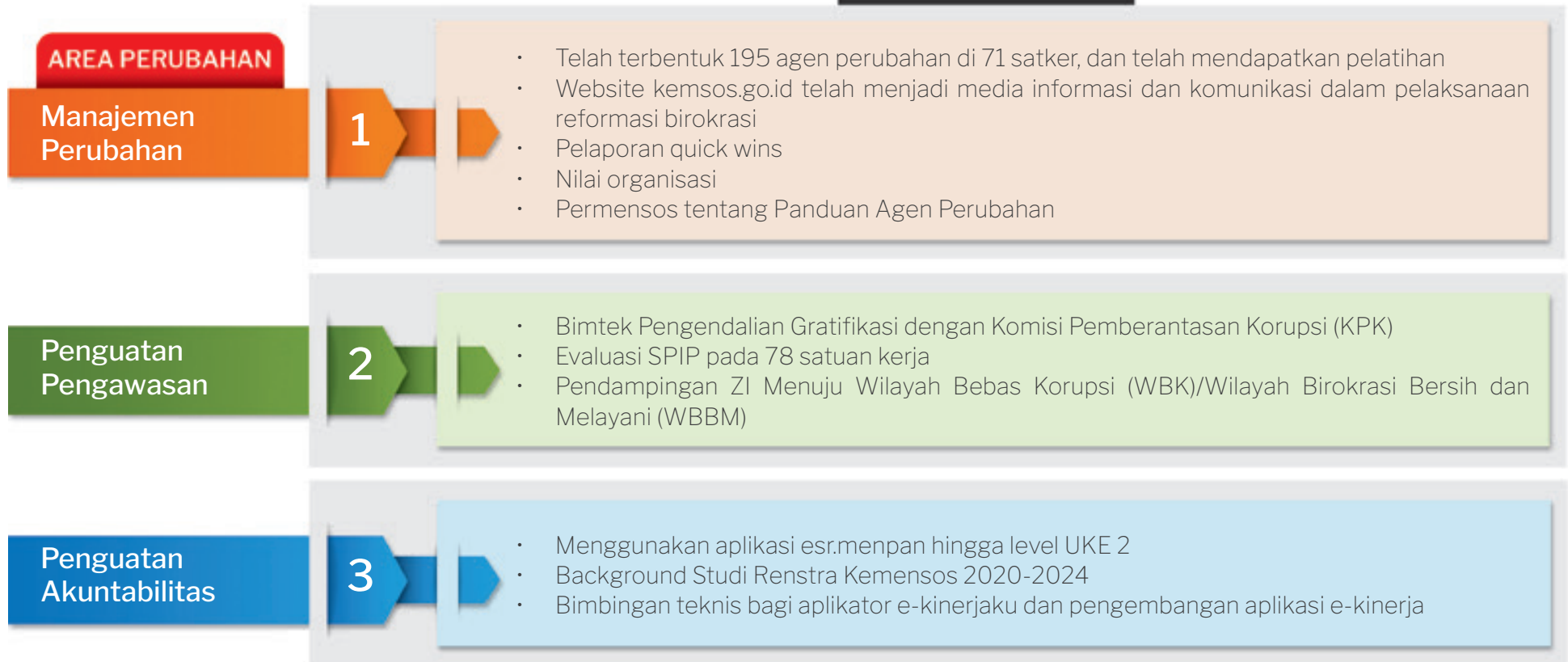
■ Program Dukungan Manajemen (Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial)

	TARGET	REALISASI	%	CATATAN
 Verifikasi dan Validasi data terpadu	96.700.000 Jiwa	96.195.551 Jiwa	101,55	

■ Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Kementerian Sosial terus berupaya meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sehingga nantinya dapat menjadi institusi yang lebih melayani, akuntabel dan transparan.

CAPAIAN TAHUN 2018



CAPAIAN TAHUN 2018

AREA PERUBAHAN

Kelembagaan

4

- Penetapan Kepmensos No.20/HUK/2018 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Kepmensos No.18/HUK/2018 tentang Uraian Tugas Pelaksana di lingkungan Kemensos
- Perubahan nomenklatur dan alih fungsi Panti
- Penataan dan pembahasan organisasi Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan Deputi Kelembagaan dan Tatalaksana KemenPAN dan RB.
- Penataan Lembaga Non Struktural di Lingkungan Kementerian Sosial (Komnas Disabilitas dan Komnas Lansia)
- Instrumen monev kelembagaan pusat dan daerah
- Penataan dan pembahasan Perubahan SOTK dan alih fungsi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badiklit Pensos.

Tata Laksana

5

- Peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan telah dijabarkan ke dalam SOP Makro.
- Reviu SOP
- Penetapan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di lingkungan Kementerian Sosial.
- Pengembangan e-gov.
- Pelaksanaan kebijakan penerapan keterbukaan informasi publik, serta melakukan update data dan informasi di website kemensos.
- Penetapan Anjab dan ABK serta pelaksanaan evaluasi jabatan.
- Proses Penerimaan CPNS yang dilakukan secara transparan dengan sistem online.
- Keputusan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2018 tentang Peta Jabatan dan formasi jabatan pelaksana di lingkungan Kementerian Sosial

CAPAIAN TAHUN 2018

AREA PERUBAHAN

Sumber Daya Manusia

6

- Pelaksanaan promosi secara terbuka.
- Permensos tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural dilingkungan Kemsos.
- Asessment terhadap pegawai untuk jabatan pimpinan Tinggi dan administrator dan Pengawas.
- Penggunaan Sistem Informasi Kepegawaian
- Penerapan aturan disiplin /kode etik perilaku.

Penguatan Peraturan Perundang-Undangan

7

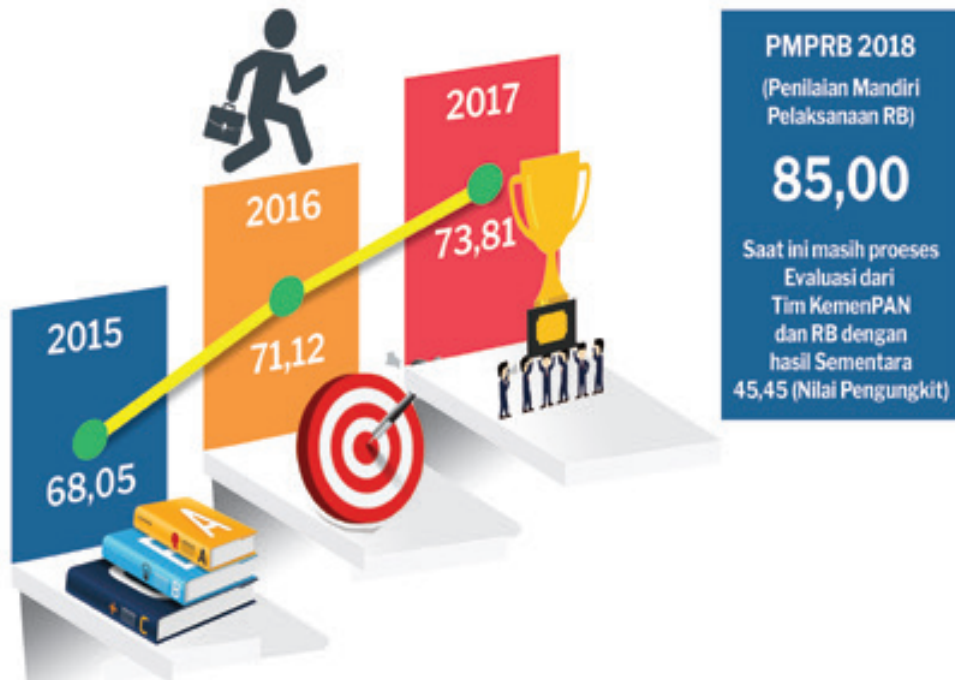
- Membentuk Tim Identifikasi, Analisis, dan Kajian Pemetaan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Sosial melalui Keputusan Menteri Sosial Nomor 127/HUK/2018.

Pelayanan Publik

8

- Meraih Top 99 dan top 40 dalam kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat nasional

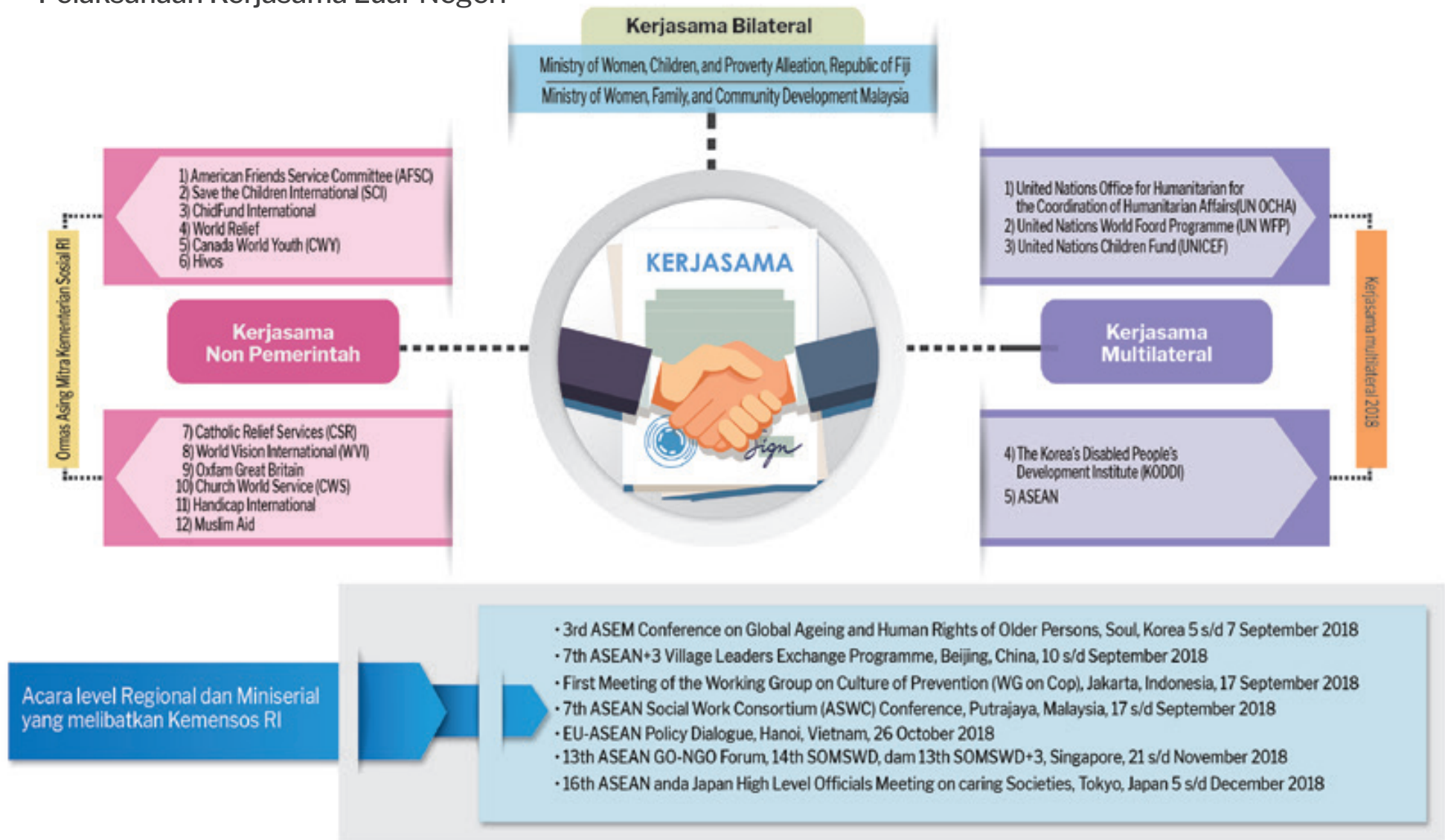
■ Perkembangan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial



■ Perkembangan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sosial



■ Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri



■ Kementerian Sosial sebagai Center of Excellence Program Bantuan Sosial Non Tunai



Kementerian Sosial juga telah menjadi tempat belajar bagi negara-negara lain, terutama dalam pelaksanaan conditional cash transfer.



20 delegasi Pemerintah Nigeria belajar penerapan PKH 14 November 2018

■ Peristiwa Penting Tahun 2018

Pergantian Tampuk Kepemimpinan



13 FEBRUARI

SERAH TERIMA JABATAN MENTERI SOSIAL

Idrus Marham diangkat sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa, sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 10/P Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Sosial Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019.



24 AGUSTUS

SERAH TERIMA JABATAN MENTERI SOSIAL

Agus Gumiwang Kartasmita diangkat sebagai Menteri Sosial menggantikan Idrus Marham, sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 148/P/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Sosial Kabinet Kerja Sisa Masa Jabatan 2014-2019.



13 FEBRUARI SIKS-NG 2.0

Menteri Sosial meluncurkan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) 2.0 dan Sosialisasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.



5 JUNI KEMENSOS KEMBALI RAIH WTP

Kementerian Sosial RI kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2017. Capaian ini sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 di tengah naiknya anggaran belanja bantuan sosial dan belanja lainnya dari semua satker baik di kantor pusat maupun UPT di daerah.



JUNI UKHUWAH ISLAM DAN KEHIDUPAN SOSIAL

Ukhuwah Islamiyah, program kerjasama Kementerian Sosial dengan TVRI dan Himbara untuk mengajak masyarakat aktif dalam penanganan masalah sosial di masyarakat. Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut para menteri dari Kabinet Kerja, pejabat Kementerian Sosial, TKSK dsb.



29 JULI

GEMPA LOMBOK

Pada 29 Juli 2018 pukul 06.47 WITA terjadi gempa sebesar 6.4 SR yang berpusat di 47 km timur laut Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dengan kedalaman 24 km. Guncangan gempa bumi dirasakan di seluruh wilayah Pulau Lombok, Pulau Bali dan Pulau Sumbawa. Gempa ini merupakan rangkaian gempa awal sebelum gempa bermagnitudo lebih besar pada 5 Agustus 2018.



UPT REHSOS DAN PUSPENSOS MERAHAI PENGHARGAAN ISO 9001:2015

Pusat Penyuluhan Sosial dan 5 UPT Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, yaitu PSPP Galih Pakuan Bogor, PSBG Ciung Wanara Bogor, PSMP Handayani Jakarta, PSBR Bambu Apus Jakarta, dan PSBN Tan Miyat Bekasi mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015. Penghargaan diberikan oleh *Country Manager World Wide Quality Assurance*. ISO 9001:2015 merupakan standar internasional di bidang sistem manajemen mutu. Prinsip manajemen mutu yang dinilai adalah fokus yang kuat pada pelanggan (dalam hal ini adalah masyarakat), motivasi dan implikasi dari top manajemen, proses dan perbaikan secara terus menerus.



12 AGUSTUS

GEBYAR PRESTASI KELUARGA SEJAHTERA

Kementerian Sosial menyelenggarakan Gebyar Keluarga Berprestasi di Bumi Perumahan dan Graha Wisata Pramuka Cibubur sebagai apresiasi kepada keluarga dan anak-anak berprestasi. Acara diikuti 6.000 orang yang terdiri dari anak-anak berprestasi, penerima manfaat berprestasi, keluarga sejahtera mandiri, SDM Pelaksana PKH, Sakti Peksos, petugas panti, relawan sosial, dunia usaha, perguruan tinggi, serta Dinas Sosial Provinsi dan Kab/Kota. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memotivasi anak-anak bahwa kesuksesan tidak hanya bergantung pada fasilitas yang tersedia



12 SEPTEMBER

MOU DENGAN FKPPi

Penandatanganan MoU antara Kementerian Sosial dengan Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan & Putra Putri TNI POLRI (FKPPI). Dalam Penandatanganan MOU tersebut Pemerintah mendorong Organisasi - Organisasi non pemerintah termasuk FKPPI berperan aktif dalam program-program pembangunan sosial.



28 SEPTEMBER

GEMPA, TSUNAMI, LIKUIFAKSI SULAWESI TENGAH

Pada tanggal 28 September 2018 pukul 18.02 WITA terjadi peristiwa gempa berkekuatan 7.4 SR yang diikuti dengan tsunami di pantai Barat Pulau Sulawesi bagian utara. Pusat gempa berada di 26 km utara Donggala dan 80 km barat laut kota Palu dengan kedalaman 10 km. Sebanyak 633 personil Tagana dikerahkan dalam penanganan bencana.



6-13 SEPTEMBER

ASIAN PARA GAMES 2018

Kementerian Sosial turut mendukung pelaksanaan Asian Para Games 2018, melalui sosialisasi Asian Para Games kepada organisasi Penyandang Disabilitas, memfasilitasi penyediaan transportasi untuk peserta dengan memenuhi persyaratan aksesibilitas, memfasilitasi ToT untuk koordinator volunteer, Monev aksesibilitas pada fasilitas yang digunakan, memfasilitasi/ pengerahan massa penyandang disabilitas, membantu mengkoordinasikan Games Legacy Asian Para Games untuk menjadikan Indonesia sebagai negara ramah disabilitas.



30 OKTOBER TOI PORIO

Menteri Sosial menerima gelar adat “Toi Porio” atau berarti “Yang Dirindukan” dari Lembaga Adat Katomakakaan Masamba, bertempat di Rumah Adat Katokkoan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.



NOVEMBER PENGAMBILALIHAN GEDUNG CAWANG KENCANA

Gedung Cawang Kencana di Jalan Mayjen Sutoyo Jakarta Timur resmi diambil alih Kementerian Sosial setelah melalui proses panjang sesuai putusan hukum tingkat kasasi Mahkamah Agung. Tanah dan Gedung Cawang Kencana merupakan aset Kementerian Sosial yang telah dikembalikan kepada Kementerian Sosial oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur melalui eksekusi berdasarkan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti tanggal 26 Februari 2015.



5 NOVEMBER PENGANUGERAHAN KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK

Kementerian Sosial mendapatkan penghargaan sebagai Badan Publik yang Cukup Informatif dalam implementasi UU No.14 tahun 2008, dari Komisi Informasi Pusat.



UPT KEMENSOS MERAIH PENGHARGAAN TOP 99 DAN TOP 40 INOVASI PELAYANAN PUBLIK

UPT Kementerian Sosial berhasil meraih Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik dari Kemenpan RB. Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2018 diraih oleh BBRSPDI Kartini Temanggung dan PSAA Alyatama Jambi. Penghargaan diberikan di Surabaya pada 19 September 2018. Selain itu, BBRSPDI Kartini Temanggung juga meraih Top 40 Inovasi Pelayanan Publik yang dikategorikan outstanding (terpuji) dengan program “menca-pai Titik Nol Kerentanan Penyandang Disabilitas Intelektual melalui Shelter Workshop Peduli”. Penghargaan Top 40 diberikan di Balai Sidang Senayan Jakarta pada 7 Novem-ber 2018.



22 DESEMBER

TSUNAMI SELAT SUNDA

Pada 22 Desember 2018 terjadi tsunami yang disebabkan oleh longoran bawah laut Anak Krakatau di Selat Sunda yang menghantam daerah pesisir pantai barat Provinsi Banten dan sebagian selatan Lampung. Bencana ini mengakibatkan 437 orang mening-gal, 23 orang hilang, 2.752 rumah rusak, 7.202 orang luka berat, dan 36.923 orang men-gungsi.

27 DESEMBER

MoU DENGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Kementerian Sosial menandatangani nota kesepahaman dengan Kement-erian Perindustrian tentang Pela-tihan, Sertifikasi, dan Penempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas pada 27 Desember 2018. Kerja sama ini merupakan bentuk komitmen pemerintah meningkatkan kesejah-terataan penyandang disabilitas dalam bentuk perluasan peluang kerja.



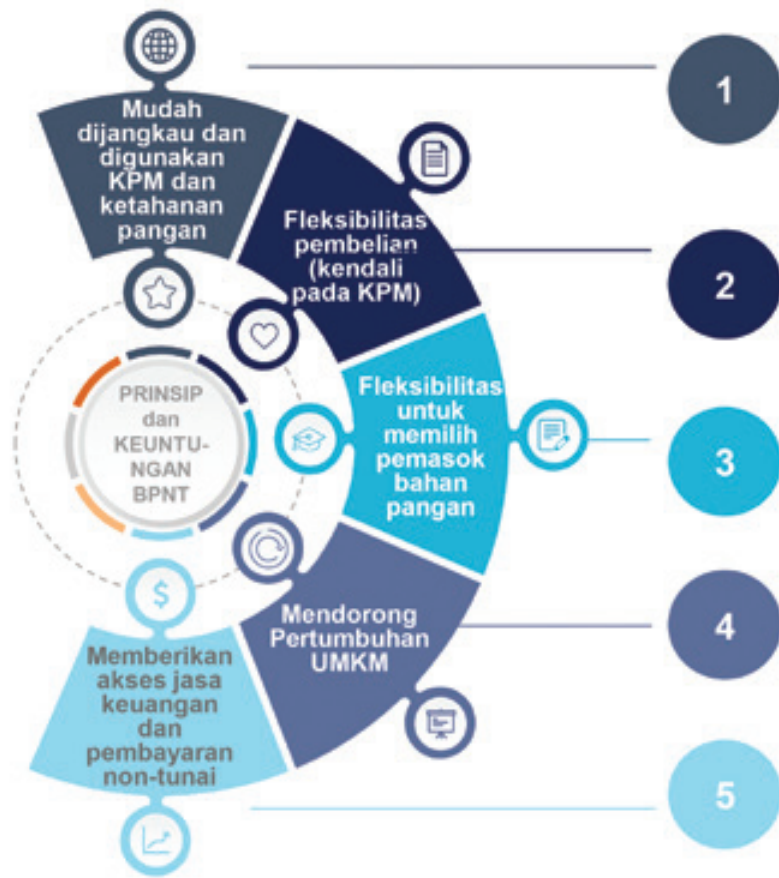


BAB 3

Dampak Pelaksanaan Program

■ Hasil Evaluasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Oleh Microsave

Ringkasan temuan riset (1/2)



1 Studi ini mencatat bahwa 96% KPM dan 89% e-warong **puas dengan BPNT** dan merasakan bahwa proses BPNT saat ini **mudah dan nyaman**. Lokasi e-warong dekat dengan rumah KPM dengan waktu tempuh sekitar 10 menit (median). Studi ini menemukan bahwa nilai median biaya pangan per rumah tangga KPM per bulan adalah 700.000 rupiah (mayoritas 4-5 anggota keluarga), yang menunjukkan bahwa KPM berasal dari golongan miskin. BPNT menyediakan **bahan pangan berkualitas premium** dan membantu KPM untuk **memenuhi satu hingga dua minggu kebutuhan pangan mereka** (atau 12-29% total biaya pangan bulanan untuk 4-5 orang per keluarga).



2 Pemberian bahan pangan dalam bentuk paket menyebabkan kurangnya kebebasan KPM dalam memilih bahan pangan, meskipun tidak ada keluhan yang signifikan dari KPM. Bahan pangan dalam bentuk paket membantu e-warong dalam mengelola persediaan dan antrian yang mendorong meningkatnya kepuasan KPM (karena proses pencairan dapat berjalan dengan cepat).

3 Hampir semua e-warong memiliki **kebebasan untuk memilih pemasok bahan pangan**. Di beberapa wilayah, staff Kemsos menunjuk pemasok. Data menunjukkan bahwa e-warong menyukai kerjasama dengan pedagang besar dan produsen langsung, petani, penggilingan padi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Peran BULOG masih penting karena memberikan kemudahan pembayaran sehingga membantu e-warong dalam mengelola modal kerja.

4 Studi ini menunjukkan bahwa BPNT memberikan **peluang usaha** bagi pengusaha mikro, terutama **wanita (68%)**, dan rantai suplai yang terkait. Hal ini juga **mendorong pertumbuhan e-warong KUBE** yang dijalankan oleh para penerima PKH. Hal ini mengindikasikan bahwa BPNT memberdayakan dan menempatkan perempuan sebagai fokus dan meningkatkan posisi mereka dalam rumah tangga.

5 BPNT membantu meningkatkan **keuangan inklusi terhadap masyarakat miskin, terutama wanita**. 87% KPM baru pertama kali memiliki rekening bank melalui KKS. Hal ini juga membantu pengusaha mikro terbiasa dengan pembayaran digital. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mendorong terciptanya masyarakat non-tunai. Namun, penggunaan rekening masih rendah. Penting untuk mengedukasi KPM (dan e-warong) untuk menggunakan rekening KKS untuk misalnya menabung.

Ringkasan temuan riset (2/2)

	Hal-hal positif	Kendala/potensi perbaikan
 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	<p>96% KPM puas terhadap program BPNT. KPM puas dengan kualitas bahan pangan yang diterima serta terjaminnya pasokan.</p> <p>Ada peningkatan yang nyata dalam dalam berbagai aspek implementasi program dibandingkan dengan 2017 seperti: pemahaman akan detail skema (ketepatan jumlah dan waktu penyaluran), insiden biaya “Terima kasih” yang lebih sedikit, pengurangan antrian dan proses pencairan yang lebih cepat. Juga pengurangan signifikan dalam masalah teknis yang dihadapi seperti saldo kosong, kerusakan jaringan/sistem, dll.</p>	<p>Isu “Lupa PIN” kartu KKS secara fundamental dinilai masih ada. Beberapa praktek yang diadopsi oleh e-warong/bank untuk mengelola masalah tersebut cenderung masih mengandung risiko jika dilihat dari prinsip kerahasiaan dan perlindungan pelanggan. Mekanisme pembayaran yang lebih baik dapat dieksplorasi untuk peningkatan layanan.</p>
 E-warong	<p>89% e-warong puas atas program secara keseluruhan.</p> <p>E-warong mendiversifikasi pemasok untuk pembelian beras dan telur. Terdapat peningkatan yang cukup baik atas pendapatan e-warong dari program BPNT (dari Rp. 1 juta (2017) menjadi Rp. 1.2 juta (median) per e-warong per bulan).</p> <p>Hampir semua e-warong ingin melanjutkan kerjasama untuk program BPNT ini di tahun 2019 dan seterusnya.</p>	<p>Rata-rata jumlah KPM yang dilayani per e-warong, selain e-warong KUBE, lebih rendah dibandingkan tahun 2017. Hal ini mempengaruhi tingkat kepuasan beberapa e-warong.</p> <p>Konektivitas yang stabil masih menjadi tantangan di beberapa wilayah.</p> <p>Pelatihan e-warong terbatas pada penggunaan mesin EDC. Pemahaman e-warong terhadap (tujuan) program BPNT secara keseluruhan dan skema keuntungan masih perlu ditingkatkan.</p>

■ Hasil Evaluasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bansos Rastra Oleh B2P3KS Yogyakarta

A. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

- Tingkat kemanfaatan program BPNT bagi KPM secara rerata ditinjau dari segi ekonomi sebesar 96,26% sedangkan dari segi sosial sebesar 96,34%.
- Tingkat kepuasan KPM terhadap program BPNT sebesar 80,12%.
- Program BPNT mencukupi sebagian kebutuhan pangan KPM, khususnya untuk kebutuhan beras dan telur. Kontribusi program BPNT untuk pemenuhan kebutuhan beras KPM sebesar 30 % sedangkan kebutuhan telur (pemenuhan kebutuhan protein) tercukupi sebesar 4,46%.

BPNT mampu memenuhi sebagian kebutuhan pangan untuk keluarga, serta dapat membantu meningkatkan gizi seimbang bagi KPM.





B. Bansos Rastra

Hasil evaluasi efektivitas program BPNT di 34 Kota/ Kabupaten oleh Tim Peneliti B2P3KS, diperoleh kesimpulan:

- Program Bansos Rastra sudah memenuhi harapan ketepatan sasaran, harga, jumlah, kualitas, waktu, administrasi, dan manfaat dengan baik.
- Bansos Rastra memiliki tingkat kemanfaatan yang tinggi bagi KPM. Tingkat kemanfaatan program Bansos Rastra bagi KPM secara rerata ditinjau dari segi ekonomi sebesar 94,46% sedangkan dari segi sosial sebesar 96,34%. Di samping itu, KPM merasa puas terhadap program Bansos Rastra dengan tingkat kepuasan sebesar 80,01%.
- Kontribusi Bansos Rastra terhadap pemenuhan kebutuhan pangan (beras) sebanyak 34% dari total kebutuhan pangan setiap bulan.

■ Hasil Evaluasi SLRT dan Puskesmas

Sampai dengan tahun 2018 Puskesmas yang terbentuk adalah 2.175 Puskesmas dengan capaian realisasi 836,54% terdiri dari 260 Puskesmas merupakan Puskesmas yang dibentuk Kementerian Sosial dengan APBN dan 1.915 Puskesmas merupakan Puskesmas mandiri atau melalui APBD Kabupaten/Kota.

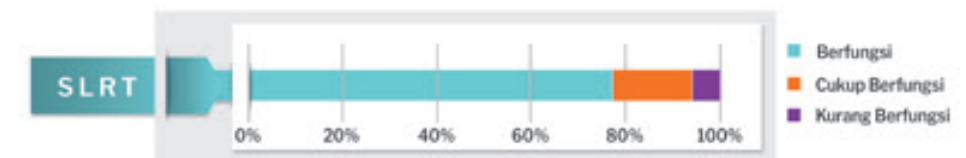
Berdasarkan hasil pendataan dan monitoring didapatkan data bahwa dukungan anggaran daerah terhadap penyelenggaraan SLRT cukup tinggi yaitu Rp83.421.247.987,- yang merupakan total dukungan APBD SLRT dari 61 Kabupaten/Kota. Anggaran tersebut terdiri dari Rp73.016.300.387,- merupakan total anggaran APBD SLRT dari 46 Kabupaten/Kota pembentukan tahun 2016 dan Rp10.404.947.600,- total anggaran APBD SLRT dari 15 Kabupaten/Kota pembentukan tahun 2017.



Terdapat 9 Kabupaten/Kota yang belum mengalokasikan dukungan anggaran untuk SLRT terdiri dari 4 daerah pembentukan tahun 2016 yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Kediri, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Jenepono dan 5 daerah pembentukan tahun 2017 yaitu Kota Denpasar, Kota Serang, Kota Solok, Kota Bangka, dan Kabupaten Sarolangun.

Capaian pengembangan Puskesmas sangat tinggi yaitu 836,54% dari target, yang didukung penggunaan Dana Desa/Alokasi Dana Desa dan juga dukungan APBD untuk petugas Puskesmas di beberapa daerah. Dari 70 Kabupaten/Kota penyelenggaraan SLRT terdapat 260 Puskesmas merupakan Puskesmas dengan APBN sedangkan 1.915 Puskesmas merupakan Puskesmas mandiri dengan dukungan dana DD/ADD dan APBD yang merupakan inisiatif dari 22 Kab/Kota.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap 70 lokasi SLRT (50 SLRT pembentukkan 2016 dan 20 SLRT pembentukkan 2017), didapatkan hasil 77% SLRT berfungsi dengan baik, 17% cukup berfungsi dan 5% kurang berfungsi.



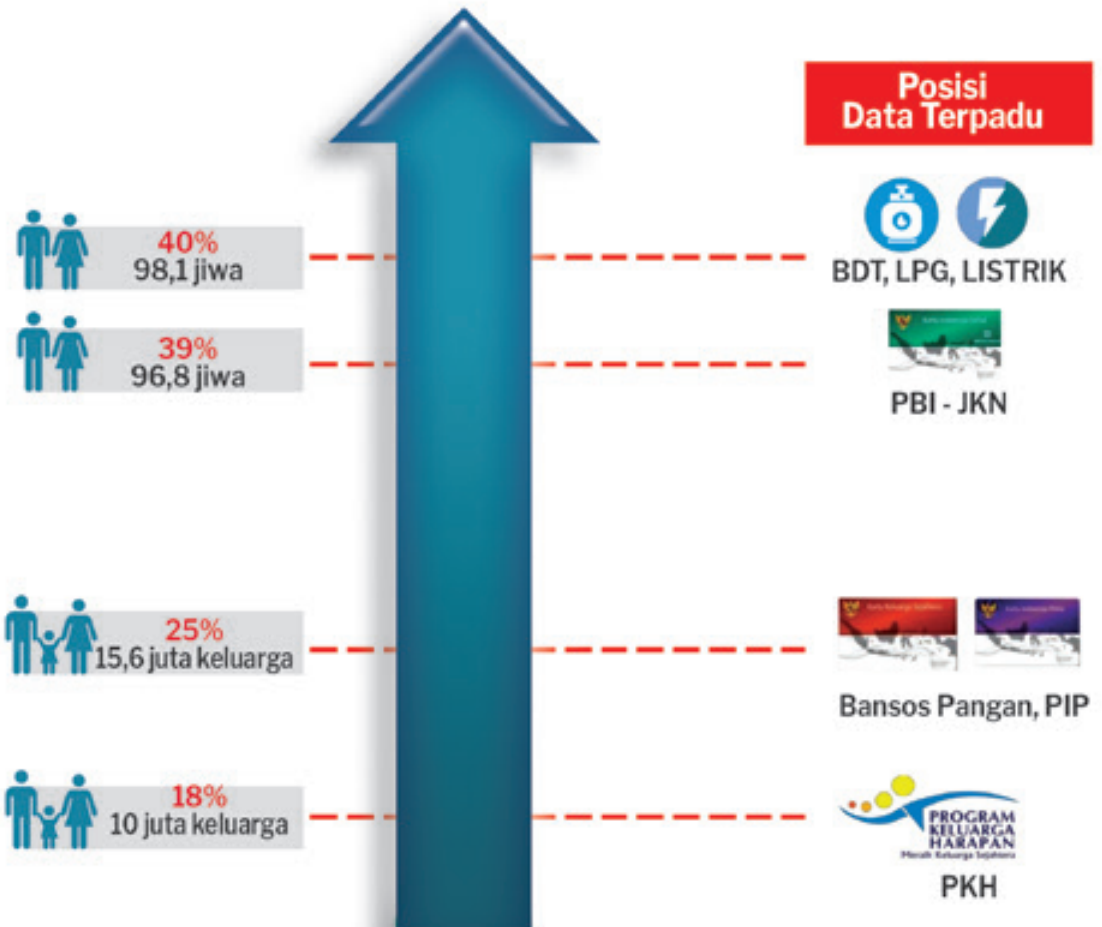


■ Pengelolaan Data Terpadu Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Dalam Rangka Memastikan Ketepatan Sasaran

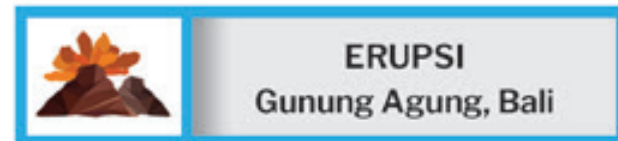
Amanat UU

UU Nomor 13/2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin bahwa seluruh program Penanganan Fakir miskin mengacu pada Basis Data Terpadu (BDT) Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang dikelola oleh Kementerian Sosial.

BDT diolah dengan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation SIKS-NG



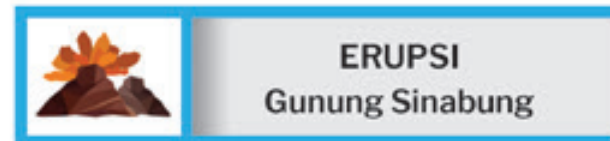
■ Operasi Penanggulangan Bencana Tahun 2018



Total Bantuan Rp. 8,2 Milyar

- Bantuan Logistik
- Santunan Ahli Waris

Petugas yang dikerahkan : 275 personil



Total Bantuan Rp. 79,1 Milyar

- Bantuan Logistik
- Santunan Ahli Waris
- Bantuan Jaminan Hidup
- Bantuan Huntap

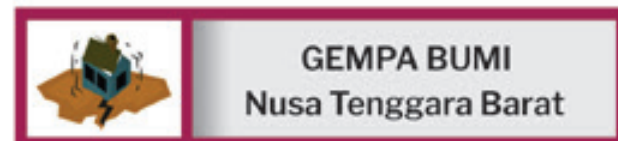
Petugas yang dikerahkan : 267 personil



Total Bantuan Rp. 23,7 Milyar

- Bantuan Logistik
- Santunan Ahli Waris
- Santunan Korban Luka
- Bantuan Jaminan Hidup

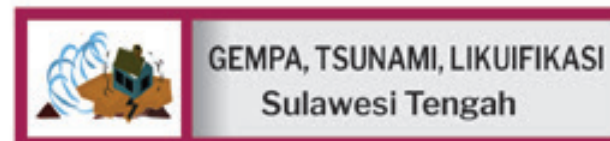
Petugas yang dikerahkan : 457 personil



Total Bantuan Rp. 17,6 Milyar

- Bantuan Logistik
- Santunan Ahli Waris
- Paket Sembako
- Peralatan Dapur Keluarga

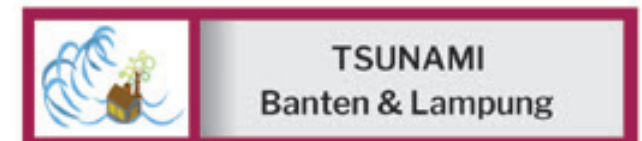
Petugas yang dikerahkan : 613 personil



Total Bantuan Rp. 7,9 Milyar

- Bantuan Logistik
- Paket Sembako

Petugas yang dikerahkan : 633 personil



Total Bantuan Rp. 2,89 Milyar

- Bantuan Logistik
- Santunan Ahli Waris

Petugas yang dikerahkan : 774 personil

DAMPAK PENANGANAN / OUTCOME:

1. Korban bencana khususnya kelompok rentan mendapatkan kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat.
2. Pemulihan dan penguatan sosial pasca bencana bagi korban bencana
3. Masyarakat kembali berfungsi sosial.



MOTO TAGANA :
We are the first help and care

■ Kontribusi Kementerian Sosial dalam Asian Paragames 2018



Jumlah alumni binaan Kementerian Sosial yang berpartisipasi dalam Asian Paragames 2018

71 dari 293 Atlet
16 dari 18 Cabor

EMAS

1. **Jendi Pangabean** Cabor Renang (PSBD Budi Perkasa Palembang),
2. **Yuni** Cabor Catur (PSBD Budi Perkasa Palembang)
3. **Maksum Firdaus** Cabor Catur (PSBD Budi Perkasa Palembang),
4. **Nasip Parta Simanja** Cabor Catur (PSBD Budi Perkasa Palembang)
5. **Agus** Cabor *Lawn ball* (PSBN Wyata Guna Bandung)
6. **Julia Verawati** dan **Kacung** Cabor *lawn ball* (PSBN Wyata Guna Bandung)



6 Emas dari Cabor:

Renang (1), Catur (3), *lawn ball* (2)

3 Perak dari Cabor :

Atletik (1), *lawn ball* (1), tenis meja (1)

3 Perunggu dari Cabor :

Atletik (1), renang (1), catur (1)

PERAK

1. **Abdul Halim** Cabor Atletik (PSBN Wyata Guna Bandung)
2. **Euis** Cabor *lawn ball* (PSBN Wyata Guna Bandung)
3. **Banyu Tri Mulyo** dan **Hamidah** Cabor tenis meja (BBRVBD Cibinong)

PERUNGGU

1. **Jendi Panggabean** Cabor renang (PSBD Budi Perkasa Palembang)
2. **Tita** cabor Catur (PSBN Wyata Guna Bandung)
3. **Abdul Halim** Cabor Lari (PSBN Wyata Guna Bandung)

Ketua NPC (National Paralympic Comitee) Marbun adalah Alumni BBRSD Soeharso Solo

Success Story



Balai Rehabilitasi Sosial ODH "Wasana Bahagia" di Ternate

SUKSES STORY

Desy Rahmasari
23 Tahun

Saya **Desi**, asal Sulawesi Tengah, umur saat ini 23 Tahun. Saya ikut program rehabilitasi di PSRS ODH "Wasana Bahagia" di Ternate. Pada bulan Juli hingga Desember Tahun 2017. Saya ikut ke Ternate awalnya sebagai pelarian saya atas virus HIV yang telah ada pada tubuh saya. Namun, setelah saya mulai mengikuti berbagai kegiatan di dalam pantu, saya mulai menemukan keceriaan dan kepercayaan bahwa masih ada kesempatan kedua bagi saya. Selama berada di pantu, saya bisa curhat dengan teman-teman ODHA, bertukar pengalaman yang difasilitasi oleh para pekerja sosialnya yang sangat mendukung kami keterampilan sablon kemudian saya pilih sebagai bekal keterampilan produktif bagi saya setelah ke luar dari pantu.

Setelah 6 bulan berlalu, kami kemudian disalurkan dengan pemberian bantuan 5 juta rupiah, menggunakan dana tersebut untuk memulai membuka usaha Sablon kecil-kecilan. Melihat semangat saya, kakak saya kemudian menawarkan untuk bekerja sama untuk menjalankan usaha tersebut. Seiring berjalannya waktu usaha sablon yang saya rilis bersama kakak saya mulai berkembang. Status saya sebagai ODHA di keluarga juga mulai diterima. Tidak lupa saya selalu patuh untuk mengkonsumsi ARV untuk menjaga ketahanan tubuh agar tetap stabil, karena hidup yang saya jalani sekarang telah memberikan saya semangat dan kebahagiaan yang tidak pernah saya bayangkan sebagai ODHA

Rosnawaty :

"Semakin percaya diri dan setelah tamat dari PSBRW Meohai Kendari"

Rosnawaty (lahir 2 Agustus 1979) mengalami disabilitas pada pendengarannya sejak kecil, dia tidak bisa berbicara dan juga tidak bisa mendengar. Dengan kondisi keluarganya yang jauh dari tempat pendidikan dan juga orang tua yang kurang peduli dengan pendidikan formal anak disabilitas, Rosnawaty tumbuh menjadi remaja yang kurang percaya diri.

Rosnawaty mendapatkan rehabilitasi pada tahun 1999 di Panti Sosial Bina Rungu Wicara (PSBRW) Meohai Kendari. Setelah mendapatkan rehabilitasi, Rosnawaty semakin percaya diri dan setelah tamat dari PSBRW Meohai Kendari, dia berinisiatif membuka usaha pejahitan di Kota Kendari. Rosnawaty sangat mahir dalam membuat baju baju pesta dan baju pengantin dengan desain model model terbaru. Dia mendapatkan informasi model dari media sosial dan televisi, sehingga banyak orang yang tertarik untuk menjahitkan pakaian di tempat Rosnawaty.

Saat ini pendapatan perbulannya mencapai 5 s/d 10 Juta. Rosnawaty juga mempunyai tiga karyawan untuk membantu pekerjaannya. Selain membuka usaha jahit, Rosnawaty juga diamanahkan sebagai instruktur keterampilan Penjahitan di PSBRW Meohai Kendari sampai sekarang.



Ibu Murtiah :

“Saya menyetor uang untuk ditabung”

Ibu Murtiah adalah peserta PKH Kohor 2012 yang berasal dari Desa Kedawung Kecamatan Bojong Kab Tegal, dan mempunyai tiga anak. Ibu Murtiah menjadi peserta PKH karena berasal dari keluarga miskin dan mempunyai komponen PKH (dari



ketiga anaknya, dua masuk menjadi komponen PKH yaitu kategori anak sekolah). Semenjak menjadi peserta PKH Ibu Murtiah selalu menyetor uang untuk ditabung setiap pencairan bantuan PKH. Dari tabungan itulah Ibu Murtiah mencoba membuka usaha dengan menjadi pedagang. Di tahun 2018 Ibu Murtiah dengan kesadaran mengundurkan diri dari kepesertaan PKH karena merasa mandiri secara ekonomi.

KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

Ini Prestasi Kita...

“
Uang PKH dimanfaatkan untuk biaya sekolah anak saya. Untuk modal usaha saya pinjam ke koperasi untuk beli dua mesin jahit. Berdua dengan anak saya, kami membuka pesanan kebaya. Sekarang saya lebih tenang karena usaha sudah berjalan baik dan sudah lepas dari penerima PKH.

Ni Balik Sekar
Penerima Manfaat PKH
Kabupaten Gianyar Bali



“
Sebelum mendapatkan bantuan PKH, saya tidak punya apa-apa. Setelah dapat bantuan PKH sekarang saya bisa berjualan kecil-kecilan di rumah. Untuk biaya sekolah anak pun terjamin.

Lina Marlina
Keluarga Penerima Manfaat (KPM),
Garut, Jawa Barat.

A photograph of a woman wearing a bright blue hijab and a black and white checkered top. She is holding two PKH cards in her hands. The background is a crowd of people, suggesting a public event or gathering.



BAB 4

Outlook 2019

Rencana Kerja Pemerintah 2019

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2019

1 **PRIORITAS NASIONAL**
 PEMBANGUNAN MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN
 PENINGKATAN PELAYANAN DASAR



Program Prioritas

KEGIATAN

- 1** **PERCEPATAN PENGURANGAN KEMISKINAN**
 - Penyaluran Bantuan Sosial Keluarga Miskin (PKH) - 10.000.00 KPM
 - Bantuan Pangan Secara Non Tunai - 15,6 Juta KPM
 - KUBE/UEP di Perkotaan, Perdesaan, Pesisir, PPK dan PAN - 101.800 KPM
- 2** **PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT**
 - Rehabilitasi Sosial Orang dengan HIV/AIDS - 950 Orang
- 3** **PEMERATAAN LAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS**
 - Penyediaan Literasi Khusus Bagi Disabilitas - 35 Literasi
- 4** **PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN LAYAK**
 - Pembangunan Rumah KAT - 2.099 KK
 - Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni - 14.000 KPM
- 5** **PEMERATAAN LAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS**
 - a. Verifikasi dan Validasi Data Terpadu - 107.200.000
 - b. Program Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2) bagi Pendamping Sosial PKH - 21.900 Orang
 - c. SDM Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Sertifikasi - 21.900 Orang
 - d. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Mendapat Akreditasi - 3.000 LKS
 - e. Kabupaten/Kota yang mengembangkan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) - 150 Kab/Kota
 - f. Desa/Kelurahan yang Menyelenggarakan Puskessos - 300 Des/Kel
 - g. Anak yang Mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial - 101.000 Anak
 - h. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas - 50.884 Orang
 - i. Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia - 50.340 Orang
 - j. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial,
 - k. TKSK yang Mendapatkan Pemberdayaan - 7.201 Orang

2 **PRIORITAS NASIONAL**
 PENGURANGAN KESENJANGAN ANTAR WILAYAH MELALUI
 PENGUATAN KONEKTIVITAS DAN KEMARITIMAN



Program Prioritas

KEGIATAN

- 1** **PENANGGULANGAN BENCANA**
 - Perlindungan Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Penangan Darurat - 150.000 Jiwa

5 **PRIORITAS NASIONAL**
 STABILITAS KEMANAN NASIONAL DAN KESUKSEAN PEMILU



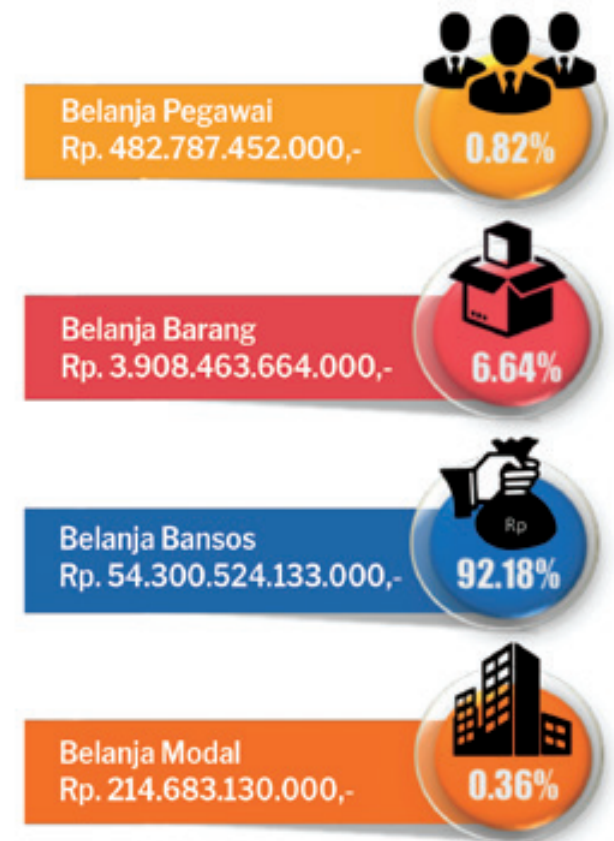
Program Prioritas

KEGIATAN

- 1** **KAMTIBMAS DAN KEAMANAN SIBER**
 - Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan dalam Penanganan Konflik Sosial - 250 Kampung
 - Korban Penyalahgunaan Napza yang Mendapatkan Rehabilitasi dan dan Perlindungan Sosial - 19.000 Orang
 - Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan Pelibatan dan Pencegahan Terorisme - 200 Kampung
 - Bekas Warga Binaan Permasalahatan Teroris yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial - 750 Orang

■ Anggaran Tahun 2019

ANGGARAN KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2019		
Total Anggaran : Rp. 58.906.458.379.000,-		
No.	UNIT	ANGGARAN
1	Sekretariat Jenderal	372.227.070.000,-
2	Inspektorat Jenderal	37.302.812.000,-
3	Ditjen Pemberdayaan Sosial	429.362.610.000,-
4	Ditjen Rehabilitasi Sosial	1.163.312.583.000,-
5	Ditjen Perlindungan & Jaminan Sosial	34.765.659.255.000,-
6	Ditjen Penanganan Fakir Miskin	21.405.310.213.000,-
7	Badan Pendidikan, Penelitian dan Penulhan Sosial	723.283.806.000,-



■ Peningkatan Indeks Bantuan Sosial PKH

Indeks bantuan sosial PKH tahun 2019 didasarkan pada proporsi beban keluarga berdasarkan jumlah anggota keluarga yang memenuhi komponen kepesertaan PKH. Melalui skema ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan KPM PKH.

Indeks bantuan sosial PKH tahun 2019

BANTUAN TETAP SETIAP KELUARGA

Reguler	:	Rp	550.000,-/keluarga/tahun
PKH Akses	:	Rp	1.000.000,-/ keluarga/tahun

BANTUAN KOMPONEN SETIAP JIWA

Penyandang Disabilitas	:	Rp	2.400.000,-
Lanjut Usia	:	Rp	2.400,000,-
Ibu hamil	:	Rp	2.400.000,-
Balita	:	Rp	2.400.000,-
SD/ sederajat	:	Rp	900.000,-
SMP/ sederajat	:	Rp	1.500.000,-
SMA/ sederajat	:	Rp	2.000.000,-

Maksimal 4 orang dalam satu keluarga



■ Perluasan Bantuan Pangan Non Tunai

Sesuai dengan arahan Presiden, pada tahun 2019, Kementerian Sosial akan memperluas pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Perluasan BPNT dilaksanakan dalam kerangka meningkatkan efektivitas bantuan sekaligus mendukung pelaksanaan keuangan inklusif.

■ Percepatan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial

Permensos No. 9 Tahun 2018

Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Standar Teknis SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi

KEGIATAN

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar **di dalam** panti
2. Rehabilitasi Sosial dasar Anak terlantar **di dalam** panti
3. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut usia terlantar **di dalam** Panti
4. Rehabilitasi Sosial dasar Gelandangan pengemis **di dalam** panti
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial Korban Bencana di Daerah **Provinsi**

KRITERIA

1. rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau
2. masih memiliki keluarga, tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
3. khusus korban bencana, pengungsi/penyintas sebanyak 51 (lima puluh satu) orang sampai dengan 100 (seratus) orang

SDM

- Setiap panti sosial harus memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Pekerja Sosial Profesional.
- Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi sertifikasi Pekerja Sosial Profesional.
- Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi pekerjaan sosial.

Standar Teknis SPM Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota

KEGIATAN

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar **di luar** panti
2. Rehabilitasi Sosial dasar Anak terlantar **di luar** panti
3. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut usia terlantar **di luar** Panti
4. Rehabilitasi Sosial dasar Gelandangan pengemis **di luar** r panti
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial Korban Bencana di Daerah **Kab/Kota**

KRITERIA

1. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
2. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus
3. khusus korban bencana, pengungsi/penyintas sebanyak 1 (satu) orang sampai dengan 50 (lima puluh) orang

SDM

- Setiap Pusat Kesejahteraan Sosial memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Relawan Sosial
- Relawan Sosial sebagaimana dimaksud harus tersertifikasi
- Sertifikasi sebagaimana dimaksud dilakukan oleh lembaga sertifikasi tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial



Demikian ringkasan capaian kinerja Kementerian Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sepanjang tahun 2018. Selanjutnya, upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial masih perlu ditingkatkan dengan konsisten secara terus menerus oleh semua jajaran aparatur pada semua tingkatan.

Keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan hasil kolaborasi dari semua pihak, baik internal Kementerian Sosial dan juga Kementerian/ Lembaga lain dan juga masyarakat. Oleh karenanya sinergi harus terus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan sosial sebagaimana yang dicita-citakan dalam UUD 1945.

BAB 2

Penutup





KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Salemba Raya No 28,
Jakarta Pusat 10430

www.kemsos.gi.id